

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AUSTRALIA DALAM
PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

THYTA AULYA PUTRI UMASANGADJI

22323078

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AUSTRALIA DALAM
PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

**Oleh:
Thyta Aulya Putri Umasangadji
22323078**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TAHUN 2021-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Dewi Masitoh, S.Hub.Int., M.Sos.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Karina
[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 26 Juni 2026



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thyta Aulya Putri Umasangadji".

Thyta Aulya Putri Umasangadji

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB 2	18
KONTEKS KEBIJAKAN NASIONAL AUSTRALIA DALAM PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TAHUN 2021–2030	18
2.1 Konteks Sosial dan Ekonomi Terhadap Penanganan Pelecehan Seksual Anak	23
2.1.1 Konteks Sosial	23
2.1.2 Konteks Ekonomi.....	29
BAB 3 ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM	34
<i>AUSTRALIA NATIONAL STRATEGY TO PREVENT AND RESPOND TO CHILD SEXUAL ABUSE</i>	34
3.1 <i>Idealized Policy</i> pada Aspek Penanganan (<i>Response</i>).....	36
3.2 <i>Implementing Organization</i> : Pelaksana Penanganan	38
3.3 Target Group, Sasaran dan Perubahan Praktik pada Penanganan.....	41
3.4 Environmental Factors, Kondisi yang Mempengaruhi Penanganan	45
3.5 Dinamika Implementasi: <i>Tensions–Transactions– Institutions -Feedback</i> ...	47
3.6 Kendala Utama dan Dampaknya terhadap Penanganan Korban.....	49
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak.....	5
Tabel 2.1 Time line terbentuknya Kebijakan National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030.....	20
Tabel 3.1 Kelompok Prioritas Strategi Nasional Australia.....	43
Tabel 3.2 Ketepatan Waktu Aplikasi Jangka Panjang yang Tersedia.....	51
Tabel 4.1 Hasil Analisis Studi Kasus Menggunakan Strategi Proses Implementasi Kebijakan Kebijakan.....	57

DAFTAR BAGAN

Bagan Teori Alur Teori Kebijakan Thomas B. Smith.....	9
Bagan Proses Implementasi Kebijakan menurut Thomas B. Smith.....	56

DAFTAR SINGKATAN

ABS	: <i>Australian Bureau of Statistics</i>
ACCCE	: <i>Australian Centre to Counter Child Exploitation</i>
ACMS	: <i>Australian Child Maltreatment Study</i>
AIFS	: <i>Australian Institute of Family Studies</i>
AIHW	: <i>Australian Institute of Health and Welfare</i>
AFP	: <i>Australian Federal Police</i>
CALD	: <i>Culturally And Linguistically Diverse</i>
CAP	: <i>First Commonwealth Action Plan</i>
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
DDS	: <i>Department of Social Services</i>
HSB	: <i>Harmful Sexual Behaviours</i>
LGBTQIA	; <i>Lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, interseks, dan asexual</i>
NAP	: <i>First National Action Plan</i>
NOCS	: <i>National Office for Child Safety</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

ABSTRAK

Pemerintah Australia dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak pada periode 2021-2024, khususnya melalui National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori The Policy Process Implementation oleh Thomas B. Smith (1973), yang memandang implementasi sebagai interaksi dinamis antara kebijakan yang diidealkan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Latar belakang masalah didasari oleh persistensi kasus pelecehan seksual anak di Australia, meskipun telah ada berbagai kebijakan sejak 2010, dengan data statistik menunjukkan peningkatan kasus daring yang signifikan. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, diikuti analisis kualitatif untuk menginterpretasikan makna data. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah membangun fondasi sistemik melalui pembentukan National Office for Child Safety (NOCS) dan action plans, serta fokus pada dukungan korban berbasis trauma-informed dan respons digital. Namun, kendala utama seperti kompleksitas privasi, variasi kapasitas yurisdiksi, dan dinamika digital masih menghambat efektivitas penanganan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya adaptasi kebijakan yang lebih fleksibel dan kolaboratif untuk mencapai dampak jangka panjang dalam perlindungan anak.

Kata kunci: Pelecehan seksual anak, implementasi kebijakan, Australia, National Strategy 2021–2030, teori Thomas J. Smith.

Abstract

This study examines the Australian Government's response to child sexual abuse over the period 2021–2024, particularly through the National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030. The research adopts a qualitative approach and applies Thomas B. Smith's (1973) The Policy Implementation Process framework, which conceptualizes implementation as a dynamic interaction among idealized policy, implementing organizations, target groups, and environmental factors. The study is motivated by the persistence of child sexual abuse in Australia despite multiple policies introduced since 2010, alongside statistical evidence indicating a significant rise in online cases. Data were collected from primary and secondary sources and analyzed qualitatively to interpret their meaning. The findings show that policy implementation has begun to establish a systemic foundation through the creation of the National Office for Child Safety (NOCS) and the development of action plans, with an emphasis on trauma-informed victim support and digital response measures. However, major constraints such as privacy complexities, uneven jurisdictional capacity, and rapidly evolving digital dynamics—continue to limit the effectiveness of victim response. The study suggests that more flexible and collaborative policy adaptation is needed to achieve long-term improvements in child protection.

Keywords: *child sexual abuse; policy implementation; Australia; National Strategy 2021–2030; Thomas B. Smith.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan penganiayaan di mana anak di bawah umur yang mengalami ataupun melakukan tindakan seksual seperti kontak seksual, pemerkosaan, pencabulan dan segala aktivitas yang melibatkan unsur seksual, tidakkan ini di lakukan dengan berbagai cara seperti dimanipulasi, dipaksa dan diancam secara fisik dan juga verbal.(UNICEF Australia., n.d.)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah berbagai kegiatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak, baik disadari maupun tidak disadari oleh anak tersebut. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun teman sebaya dan biasanya melibatkan individu atau kelompok yang mengambil keuntungan. Anak-anak yang mendapatkan tindakan pelecehan berpotensi menjadi korban pelecehan seksual apabila mereka mendapatkan ancaman atau diiming-imingi imbalan seperti uang, tempat tinggal, barang-barang, pekerjaan, dan janji kehidupan yang lebih baik (Greijer et al., 2016:18).

Pelecehan seksual online adalah berbagai macam bentuk tindakan pelecehan seksual kepada anak yang berada di usia di bawah 18 tahun yang terhubung dengan internet (*eSafety*

Commissioner,2025). Menurut World Health Organization (WHO) pelecehan seksual merupakan masalah global yang sangat serius terkait pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki banyak

konsekuensi kesehatan seperti kesehatan fisik, kesehatan reproduksi dan kesehatan mental dalam jangka pendek maupun panjang yang perlu ditangani (WHO, 2017:1).

Dalam kasus pelecehan seksual ini paksaan sering digunakan dengan tujuan membuat korban memberi persetujuan dalam melakukan tindakan seksual walaupun secara sadar maupun tidak sadar tidak ingin melakukan hal tersebut. Dalam konteks global, isu ini telah menjadi perhatian penting di berbagai forum internasional, termasuk dalam kerangka Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diratifikasi oleh sebagian besar negara, termasuk Australia.

Pada Konvensi PBB Tentang Hak Anak pada Pasal 36 menyebutkan bahwa pelecehan anak sebagai situasi apapun dan dimana seorang anak dilecehkan, disakiti atau digunakan oleh orang untuk keuntungan ekonomi, seksual, atau pribadi. Pelecehan seksual anak tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga bisa secara online, seperti jika ada seseorang memaksa anak di bawah umur untuk mengirimkan foto maupun video yang mengandung unsur seksual dengan anak di bawah umur maka tindakan tersebut sudah termasuk pelecehan anak secara daring, dan dapat ditindak pidana walaupun pihak yang dikategorikan di bawah umur memberikan persetujuan.

Berikut beberapa contoh dari tindakan pelecehan seksual anak:

- a. Pelecehan secara Langsung. Tindakan kekerasan fisik terhadap anak seperti pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, memaksa menyentuh daerah *private* pada tubuh anak, dan juga menyentuh apapun merangsang daerah kemaluan pada tubuh anak, menjual atau menyewakan anak demi kepentingan seksual, menjadikan anak sebagai objek dari prostitusi.

- b. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan secara daring/online adalah mengambil foto ataupun video anak tanpa busana, menyimpan, menjual, dan menyebarkan secara langsung maupun online, melakukan *live streaming* saat berbuat tindakan kekerasan terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindakan pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan secara langsung akan tetapi juga bisa secara daring, dengan kegiatan anak. Pada masa ini, mereka yang sering mengunggah kesehatan bahkan hingga informasi pribadi mereka di media sosial, tanpa mereka sadari mereka secara tidak langsung menjadikan diri mereka sebagai target penyerangan maupun tindakan seksual secara daring.

Australia sebagai salah satu negara yang tergolong sebagai negara maju, Australia memiliki dua wilayah dan enam negara bagian yang yaitu *New South wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia, dan Canberra*. Tindakan pelecehan terhadap anak tetap terjadi walaupun telah ditetapkannya kebijakan *Convention on the right of the child*, pada Agustus 1990 terkait dengan hak anak, salah satu negara yang masih memiliki isu terkait dengan pelecehan seksual anak adalah Australia, tercatat 9 yurisdiksi di Australia menetapkan usia dibawah 18 tahun sebagai ketetapan usia di bawah umur dilarang dalam melakukan aktivitas seksual, dikarenakan hal tersebut segala aktivitas seksual bersama dengan anak di bawah 18 tahun dianggap telah melakukan kejahatan, dalam kasus pelecehan seksual anak, Walaupun pemerintah Australia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap isu pelecehan seksual anak pada dan juga telah menunjukan komitmen mereka terkait isu tersebut dari tahun 2021, akan tetapi hal tersebut ternyata

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap menurunnya angka kasus pelecehan seksual yang terlihat pada data di bawah ini

Tabel 1.1

Angka Kasus Pelecehan Seksual Pada anak

Tahun	Presentasi Kasus
2021	120.8
2022	126.1
2023	136.3
2024	147,4

Data di atas merupakan data dari Australian Bureau of Statistics yang menunjukkan bahwa tingkat pelecehan seksual meningkat terutama pada wilayah New South Wales (naik 2.296 korban atau 19%), Queensland (naik 1.011 korban atau 14%) dengan rata-rata korban dalam kasus ini 84% tercatat sebagai perempuan dengan 38% dari mereka berusia 10 hingga 17 tahun, dan 41% dari mereka berusia di bawah dari 10 dan 17 tahun. Hal ini menunjukkan meningkatnya kasus seksual terhadap anak hanya dalam kurung waktu lima tahun setelah pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan mereka terkait dengan isu pelecehan seksual terhadap anak. Dalam data tersebut setelah lima tahun mengeluarkan kebijakan, lonjakan kasus yang terjadi bermula pada tahun 2021 dan semakin menunjukkan peningkatan ke tahun 2022 hingga akhir data laporan pada tahun 2024.

Biro Statistik Australia menyebutkan pada tahun 2021 terdapat 11% perempuan dan 4,6% laki-laki melaporkan mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak, paling sering oleh orang yang dikenal tetapi bukan anggota keluarga.

Australian Centre to Counter Child Exploitation (ACCCE) Pada tahun anggaran 2022–2023, ACCCE telah mencatat bahwa sebanyak 58.503 laporan pelecehan anak daring, dengan rata-rata 160 laporan per hari, meningkat dari 40.232 laporan tahun anggaran sebelumnya. Ini merupakan suatu yang cukup besar untuk kasus pelecehan terhadap anak, dengan peningkatan 45% dari total laporan pelecehan anak daring pada tahun pertama beroperasi lembaga pada tahun 2018.

ACCCE mengambil tindakan dengan menggabungkan keahlian dan kemampuan profesional di satu pusat, mendukung penyelidikan tentang pelecehan seksual anak secara online, dan mengembangkan strategi pencegahan yang berfokus pada menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Helen Schneider, Komandan *AFP ACCE* dan pelecehan Manusia, menyatakan bahwa meskipun jumlah laporan yang meningkat sangat mengkhawatirkan, mereka menjadi sumber daya penting untuk memerangi pelecehan anak. “Seiring dengan semakin banyaknya anak-anak dan remaja yang mengakses internet, kami melihat adanya tren peningkatan dalam kasus pelecehan seksual anak secara daring,” Helen Schneider.

Pada tahun 2024-2025, lembaga Australia yang menangani eksploitasi anak online menerima sekitar 82.764 laporan yang berkaitan dengan pelecehan seksual anak secara online. Jumlah tersebut meningkat sebesar 41% dibandingkan dengan periode 2023-2024 yang berjumlah 40.232 laporan. Peningkatan laporan ini dapat menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat, efektivitas sistem pelaporan, serta penguatan

mekanisme deteksi yang dikembangkan oleh pemerintah Australia dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak.

Pada tahun 2021 Pemerintah Australia Pertama kalinya menyusun suatu kebijakan yang tertuang pada dokumen Kerangka strategis nasional terkait perlindungan hak anak, khususnya dalam isu kekerasan dan pelecehan seksual, mencakup kolaborasi pemerintah federal, negara bagian, dan wilayah Australia.

Dokumen ini menjadi acuan edukasi keamanan anak, pemberdayaan korban, intervensi perilaku seksual bermasalah, pencegahan abuse, serta pengelolaan data dan informasi terkait pelecehan terhadap anak.

1.2 Rumusan Masalah.

Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Australia dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Australia dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terdapat dalam tahun 2021-2024.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Australia dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Federal Australia dalam penanganan pelecehan seksual pada anak yang

terjadi di Australia pada tahun 2021-2024. Penelitian ini menelaah terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan serta efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam upaya penanganan terkait kasus pelecehan seksual anak. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah Australia, di mulai dari segi aspek teknis, keterbatasan sumber daya, regulasi dan juga koordinasi antar lembaga serta pemerintah Australia.

Periode 2021-2024 merupakan fase penting bagi pemerintah federal Australia dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual setelah rekomendasi *Royal Commission into Institutional Responses to child sexual abuse*. Pemerintah Australia mempunyai dinamika yang unik karena kebijakan dan kewenangan dan perlindungan anak merupakan irisan kebijakan antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian (*State*).

Kondisi ini menjadikan Pemerintahan Australia sebagai objek penelitian yang ideal untuk dianalisa efektifitas kebijakan nasional sekaligus mengidentifikasi kendala koordinasi antar lembaga dan tingkat pemerintah. Pemerintahan Australia juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tantangan negara maju bagi perumusan kebijakan perlindungan anak secara global. Dengan memahami implementasi dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Australia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan penanganan yang didapatkan dari Kebijakan jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis merujuk pada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti sebagai bahan perbandingan atau rujukan saat melakukan penelitian, berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis pakai yaitu:

Pertama, Penelitian Yang Ditulis Oleh Ardyta Nabilah Tentang Pemerintah Australia Dalam Menangani Child Sexual Abuse Pada Institusi Agama Katolik Tahun 2013-2017, penelitian ini membahas terkait Permasalahan child sexual abuse yang dilakukan oleh Institusi Agama Katolik menjadi isu global dan Pemerintah Australia mulai menyelidiki kasus child sexual abuse yang terjadi di berbagai institusi dan menemukan kasus terbanyak dilakukan oleh Institusi Agama Katolik, dalam Penelitian ini Penanganan child sexual abuse di Australia berdasarkan prinsip hukum internasional dan human security. Dari penanganan child sexual abuse tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam hukum internasional terkait prinsip UNHCR telah diadopsi Australia untuk menjamin perlindungan anak di negaranya.

Kedua, Gemma McKibbin menulis tentang Pencegahan Perilaku Seksual yang Merugikan dan pelecehan Seksual Anak terhadap anak-anak dan remaja yang tinggal di panti jompo: Tinjauan cakupan dalam konteks Australia, pada penelitiannya McKibbin menyampaikan bahwa langkah-langkah pencegahan untuk mencegah Perilaku Seksual yang Membahayakan oleh anak-anak & orang muda serta pelecehan Seksual Anak yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkungan perawatan di luar rumah. Fokus tinjauan ini adalah Perilaku Seksual yang membahayakan dan pelecehan

Seksual Anak yang terjadi setelah seorang anak atau orang muda memasuki perawatan di rumah jompo.

Ketiga, Jurnal *A Study into the Legislative – and Related Key Policy and Operational – Frameworks for Sharing Information Relating to Child Sexual Abuse in Institutional Contexts*” oleh Carolyn Adams & Krista Lee-Jones , disusun untuk Royal Commission ke-institusi-respons terhadap pelecehan seksual anak di Australia dalam tulisannya mereka fokus pada kerangka hukum, kebijakan, dan operasional terkait pertukaran informasi antar institusi dan lintas yurisdiksi di seluruh negara bagian/teritorial Australia serta menyoroti tantangan di berbagai konteks di mana anak rentan termasuk perlindungan anak, perawatan luar rumah, layanan awal masa kanak-kanak, sekolah, rehabilitasi remaja, dan aktivitas ekstrakurikuler. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan adalah Privasi diatur oleh sejumlah undang-undang *Commonwealth* dan negara bagian yang beragam, menciptakan kompleksitas dan kebingungan dalam pelaksanaan secara praktis.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep teori *The Policy Process Implementation* oleh Thomas B. Smith, konsep ini menjelaskan komponen penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu (Smith 1973) :

1. *The idealized policy* / kebijakan yang diidealkan.
2. *The implementing organization* / organisasi pelaksana. Maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

3. *The target group* / Kelompok sasaran. yaitu didefinisikan sebagai mereka yang diharuskan untuk menyesuaikan pola interaksi baru dengan kebijakan. Mereka adalah orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
4. *Environmental factors* / faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

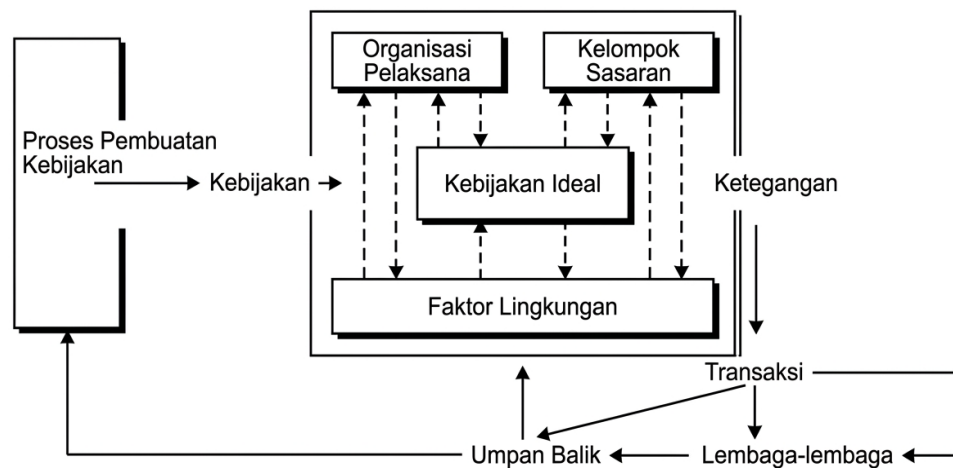
Setelah menjelaskan empat (4) komponen utama dalam proses implementasi kebijakan, Smith juga menjelaskan terdapat pula komponen yang menjadikan proses implementasi kebijakan adaptif dan dinamis yaitu :

1. *Tension* / Ketegangan adalah gesekan atau benturan konflik atau ketidaksesuaian yang muncul ketika faktor kebijakan organisasi kelompok sasaran dan lingkungan saling berhubungan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, nilai ataupun ekspektasi.
2. *Transaction* / Transaksi dimana terjadi upaya penawaran atau upaya mekanisme untuk meredakan, mengelola atau menyelesaikan ketegangan yang terjadi, transaksi bisa berupa pendekatan persuasif, pemaksaan (sanksi), kompromi dan penyesuaian aturan.
3. *Institutions*, dapat menjadi penentu keberhasilan implementasi di tingkat akar rumput. Jika institusi gagal bertransformasi, kebijakan nasional tidak akan menyentuh korban/penyintas. *Institutions* akan dihasilkan jika dilihat dari *Idealized Policy* dan dibandingkan dengan hasil aktual dari proses implementasi kebijakan (Smith 1973, 208).

4. *Feedback* / Umpan Balik, adalah hasil atau konsekuensi dari proses Transaksi yang dilakukan. Umpan balik ini akan mengalir kembali ke pembuat kebijakan (pemerintah) dan organisasi pelaksana. Berdasarkan *Feedback* ini, sistem akan menentukan nasib kebijakan tersebut ke depannya.

Bagan 1.1

Alur Teori Kebijakan Thomas B. Smith



Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori dari Thomas B. Smith yang menjelaskan terkait proses implementasi kebijakan secara menyeluruh dengan mencantumkan model alur pemikiran proses implementasi kebijakan, guna memperjelas dengan singkat mengenai permasalahan yang diteliti, dari latar belakang masalah, rumusan masalah teori yang digunakan hingga pada argumen sementara. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori atau konsep dari Thomas B. Smith yang menjelaskan terkait proses implementasi kebijakan secara menyeluruh dengan mencantumkan model alur pemikiran proses implementasi kebijakan, implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith tersebut, penelitian ini

membangun kerangka berpikir yang menempatkan implementasi kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara empat komponen utama, yaitu kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Dalam kerangka berpikir penelitian ini, keberhasilan implementasi kebijakan penanganan pelecehan seksual terhadap anak dipahami tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga pada kapasitas lembaga pelaksana dalam menjalankan kebijakan, respons serta kondisi kelompok sasaran, serta pengaruh faktor lingkungan sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanganan pelecehan seksual terhadap anak merupakan hasil dari dinamika hubungan antara keempat komponen tersebut. Analisis terhadap masing-masing komponen kemudian digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal, serta untuk menemukan berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat proses implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

1.7 Argumen Sementara

Implementasi kebijakan pemerintah Australia mengenai penanganan Pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2021-2024 yang tertuang dalam *National Strategy to prevent and respond to Child Aexual Abuse 2021-2030* dipengaruhi oleh Kebijakan yang ideal, Kelompok/badan sasaran target, Organisasi pelaksana serta faktor lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan teori ini, dapat disimpulkan sementara

bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Australia dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan menuju peningkatan. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, Implementasi kebijakan Australia dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak pada periode 2021-2024 menunjukkan peningkatan upaya yang signifikan karena adanya komitmen pemerintah Australia dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif melalui pendekatan pencegahan, penanganan korban, serta koordinasi lintas lintas lembaga. Namun berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Thomas B. Smith, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh interaksi antara kebijakan yang diidolakan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa meskipun pemerintah Australia telah membuat kerangka kebijakan yang relatif kuat, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh dinamika koordinasi antar lembaga, kapasitas institusi pelaksana, serta kompleksitas lingkungan sosial dan teknologi yang terus berkembang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa metode kualitatif merupakan metode utama dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu politik. Hal ini disebabkan oleh sifat ilmu sosial yang

mendasarkan pengetahuannya pada dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial tidak ada yang pasti, selalu berbeda setiap sudut pandang individu.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini merupakan Negara Australia. Hal itu dikarenakan dalam studi kasus yang penulis tentukan berkaitan langsung dengan Australia. Sedangkan objek dari penelitian ini merupakan implementasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dari pemerintah Australia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang didapat oleh penulis berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang penulis dapat merupakan data-data dan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta instansi terkait dari negara Australia yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis tentukan. Untuk sumber sekunder yang penulis peroleh merupakan jurnal, buku, data, serta berita-berita yang dikeluarkan oleh badan-badan peneliti atau ilmunan yang melakukan penelitian terhadap isu yang dibawa di rumusan masalah.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan tahapan yang mencakup perencanaan atau langkah dalam melakukan suatu penelitian dimulai dari pra riset sampai dengan interpretasi penelitian atau laporan penelitian.

a. Pra Riset

Tahapan ini merupakan bagian paling awal dalam melakukan penelitian atau riset. Dalam pra riset ini penulis mempersiapkan riset dengan melihat hasil laporan terkait penelitian, dan membaca bahan bacaan sesuai dengan penelitian.

b. Pengambilan Data

Dalam pengambilan data, penelitian ini mendapatkan data dari sumber sekunder seperti media tertulis, mencakup: buku teks akademik, pernyataan resmi pemerintah Australia, publikasi pemerintah, surat kabar harian, dan jurnal penelitian. Sumber sekunder dipilih berdasarkan reputasi kredibilitas media atau penerbit serta hubungannya dengan topik penelitian.

c. Analysis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah menganalisis data yang telah didapat. Langkah-langkah dalam menganalisis data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Adapun langkah-langkah tersebut seperti mengorganisir dan menyiapkan data, membaca semua data, memberi tanda dengan memberi label pada data tertentu, mengaitkan tema, dan interpretasi arti dengan menafsirkan makna data dengan penjelasan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1. Berisi dengan latar belakang yang memberikan gambaran umum terkait dengan data yang bersangkutan dengan topik penelitian, terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, cangkupan penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan sebagai gambaran umum, pada penelitian ini.

Bab 2. Membahas terkait dengan konteks yang berisi terkait dengan kebijakan pemerintah Australia pada tahun 2021-2024 yang terdapat pada *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021-2030*. Penelitian ini juga akan membahas terkait dengan konteks sosial dan ekonomi yang terdampak oleh kasus pelecehan yang terjadi di Australia pada tahun 2021-2024.

Bab 3. Akan membahas terkait dengan analisis kebijakan Pemerintahan Australia Dalam Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2021-2024.

Bab 4. Adalah Penutup yang merupakan pernyataan akhir dari penelitian ini, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran atau Rekomendasi.

BAB 2

KONTEKS KEBIJAKAN NASIONAL AUSTRALIA DALAM PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TAHUN 2021–2030

Isu Terkait Pelecehan Seksual pada anak merupakan masalah serius di Australia, dan telah menjadi perhatian publik sejak beberapa dekade lalu, terutama ketika semakin banyak kasus terungkap di berbagai institusi, seperti sekolah, gereja, panti asuhan, lembaga keagamaan, organisasi olahraga, dan komunitas lokal. Meski demikian, selama bertahun-tahun respons terhadap kasus pelecehan anak berlangsung secara terpisah dan tidak terkoordinasi, bergantung pada kebijakan masing-masing negara bagian dan institusi. Hal ini menyebabkan kerentanan sistemik, di mana pelaku dapat berpindah tempat tanpa terdeteksi, korban tidak memperoleh dukungan yang memadai, dan banyak kasus tidak ditangani secara serius.

Penyelidikan ini menghasilkan gambaran nyata bahwa pelecehan seksual anak bukan fenomena sporadis, melainkan masalah struktural yang terjadi akibat lemahnya pengawasan, budaya diam, kurangnya standar perlindungan anak, dan minimnya mekanisme akuntabilitas di institusi (*Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse* 2017).

Hasil dari rangkaian proses panjang ini adalah peluncuran *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030* pada Oktober 2021. Strategi ini merupakan kerangka nasional pertama yang komprehensif, berjangka panjang, dan terkoordinasi untuk mencegah serta menangani pelecehan seksual terhadap anak di Australia. Strategi ini menempatkan isu pelecehan seksual anak sebagai tanggung

jawab bersama bukan hanya sektor hukum, tetapi juga sektor lainnya antara lain bidang sosial, ekonomi, pendidikan kesehatan, digital, dan komunitas. Dalam strategi ini, pemerintah menekankan lima fokus utama yaitu:

- a. pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran publik;
- b. pembentukan lingkungan yang aman bagi anak di seluruh institusi;
- c. dukungan menyeluruh bagi penyintas berdasarkan pendekatan *trauma-informed*;
- d. pencegahan perilaku berbahaya sejak dini dan
- e. penguatan data serta riset untuk memandu kebijakan yang berbasis bukti.

Dengan adanya National Strategy 2021–2030, Australia memasuki fase baru dalam perlindungan anak. Strategi ini tidak hanya mengatur tindakan setelah pelecehan terjadi, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui pendidikan, standar perlindungan anak (*child-safe standards*), serta sistem deteksi dan respons cepat. Pemerintah juga menekankan pentingnya keamanan digital, mengingat perkembangan teknologi telah melahirkan modus baru pelecehan seperti grooming online, eksploitasi seksual digital, dan distribusi materi eksploitasi anak. Strategi Nasional ini dilaksanakan selama 10 tahun (2021–2030) melalui pendekatan bertahap (*phased implementation*) yang diwujudkan dalam beberapa Rencana Aksi (*Action Plans*). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah Australia melakukan evaluasi berkala, penyesuaian kebijakan, dan penguatan respons berdasarkan perkembangan bukti serta tantangan baru. (*National Office for Child Safety*)

Implementasi National Strategy dibagi ke dalam tiga fase utama, yaitu fase awal (2021–2024), fase menengah (2025–2027), dan fase akhir (2028–2030). Pembagian ini menunjukkan pendekatan kebijakan yang progresif dan reflektif, di

mana setiap fase dirancang untuk saling membangun dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi fase sebelumnya. Fase pertama (2021–2024) difokuskan pada pembangunan pondasi sistemik, termasuk penguatan kesadaran publik, pengembangan layanan berbasis trauma, serta penyusunan kerangka koordinasi nasional. Fase kedua (2025–2027) diarahkan pada konsolidasi dan perluasan program yang telah terbukti efektif, termasuk respons terhadap tantangan baru seperti eksploitasi seksual anak di ruang digital. Sementara itu, fase ketiga (2028–2030) menekankan keberlanjutan kebijakan, evaluasi nasional menyeluruh, serta reformasi lanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang. Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa strategi tidak diposisikan sebagai kebijakan statis, melainkan sebagai proses kebijakan dinamis yang memungkinkan pembelajaran institusional dan penyesuaian terhadap konteks sosial yang terus berubah.

Tabel 2.1
Time line terbentuknya Kebijakan
National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030

Tahun/Periode	Peristiwa	Dampak Kebijakan
2018-2021	National Office For Child safety dibentuk dan Konsultasi publik nasional	Koordinasi lintas pemerintah negara bagian dan Penyintas dilibatkan langsung
2021	National Strategy 2021–2030 diluncurkan	Kerangka nasional jangka panjang
2021-2024	First National Action Plan	Implementasi tahap 1

Implementasi National Strategy dibagi ke dalam tiga fase utama, yaitu fase awal (2021–2024), fase menengah (2025–2027), dan fase akhir (2028–2030). Pembagian ini menunjukkan pendekatan kebijakan yang progresif dan reflektif, di mana setiap fase dirancang untuk saling membangun dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi fase sebelumnya.

Fase pertama (2021–2024) difokuskan pada pembangunan pondasi sistemik, termasuk penguatan kesadaran publik, pengembangan layanan berbasis trauma, serta penyusunan kerangka koordinasi nasional. Fase kedua (2025–2027) diarahkan pada konsolidasi dan perluasan program yang telah terbukti efektif, termasuk respons terhadap tantangan baru seperti eksploitasi seksual anak di ruang digital. Sementara itu, fase ketiga (2028–2030) menekankan keberlanjutan kebijakan, evaluasi nasional menyeluruh, serta reformasi lanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang.

Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa strategi tidak diposisikan sebagai kebijakan statis, melainkan sebagai proses kebijakan dinamis yang memungkinkan pembelajaran institusional dan penyesuaian terhadap konteks sosial yang terus berubah.

Struktur implementasi strategi ini dijalankan melalui dua instrumen utama, yaitu *National Action Plans* Dan *Commonwealth Action Plans*. *National Action Plans* merupakan rencana aksi bersama yang disepakati oleh pemerintah federal, negara bagian, dan teritori. Rencana ini berfungsi sebagai mekanisme koordinasi lintas pemerintahan, yang bertujuan menyelaraskan kebijakan, program, dan standar layanan di seluruh wilayah Australia. Di sisi lain, *Commonwealth Action Plans* merupakan rencana aksi khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah federal. Rencana ini berfokus

pada area yang menjadi kewenangan nasional, seperti penegakan hukum federal, kerja sama internasional, pengembangan kebijakan nasional, serta penguatan sistem data dan teknologi.

Pada tahap awal implementasi, *First National Action Plan* (2021–2024) dan *First Commonwealth Action Plan* (2021–2024) menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan layanan bagi korban dan penyintas, perlindungan anak di lingkungan digital, peningkatan kapasitas tenaga profesional, serta pengembangan data dan riset nasional. Dengan demikian, rencana aksi tahap awal berfungsi sebagai fondasi operasional bagi keseluruhan strategi sepuluh tahun.

Pembentukan *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse* tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi Australia. Isu pelecehan seksual anak mencerminkan dinamika masyarakat, perubahan struktur keluarga, perkembangan teknologi, serta ketimpangan sosial ekonomi yang mempengaruhi kerentanan anak terhadap kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial dan ekonomi memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang mengapa strategi tersebut menjadi kebutuhan mendesak dan bagaimana ia dirancang untuk menjawab tantangan sistemik.

Sebelum menganalisis teknis implementasi kebijakan penanganan pelecehan seksual anak di Australia tahun 2021-2024, bab ini terlebih dahulu memetakan konsep sosial dan ekonomi sebagai determinan utama yang membentuk tingkat kerentanan pada anak-anak.

2.1 Konteks Sosial dan Ekonomi Terhadap Penanganan Pelecehan Seksual Anak

2.1.1 Konteks Sosial

Kondisi sosial di Australia menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pembentukan *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030*. Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan individu, tetapi juga berkaitan dengan perubahan struktur masyarakat, pola relasi sosial, perkembangan teknologi digital, serta tingkat kesadaran publik terhadap isu perlindungan anak. Data *Australian Bureau of Statistics* (ABS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 lebih dari 30% penduduk Australia lahir di luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar Australia, yang menunjukkan tingginya tingkat keragaman sosial dan budaya dalam masyarakat Australia (ABS, 2021). Selain itu, *Australian Institute of Family Studies* (AIFS) mencatat bahwa perubahan pola keluarga dan meningkatnya partisipasi kerja orang tua menyebabkan anak semakin banyak berinteraksi dengan institusi di luar rumah, seperti sekolah, layanan penitipan anak, organisasi olahraga, dan komunitas sosial (AIFS, 2020). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga meningkatkan risiko eksploitasi seksual anak secara daring. Australian Federal Police (AFP) dan eSafety Commissioner melaporkan adanya peningkatan signifikan kasus *online child sexual abuse* dan distribusi *child sexual abuse material* (CSAM) dalam beberapa tahun terakhir (AFP, 2021; eSafety Commissioner, 2022).

Oleh karena itu, konteks sosial Australia menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai tanggung jawab keluarga, tetapi membutuhkan keterlibatan negara, institusi, dan masyarakat secara luas melalui kebijakan nasional yang terintegrasi. Dari konteks sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. Perubahan Struktur Keluarga dan Pola Pengasuhan

Australia mengalami perubahan signifikan dalam struktur keluarga sejak dekade 1990-an hingga saat ini. Data dari *Australian Bureau of Statistics* (ABS) menunjukkan peningkatan jumlah keluarga dengan orang tua tunggal serta rumah tangga dengan kedua orang tua yang bekerja penuh waktu. Pada tahun 2021, sekitar seperempat anak Australia tinggal dalam keluarga non-tradisional, termasuk keluarga orang tua tunggal dan keluarga campuran (*blended families*) (ABS, 2022). Kondisi ini berdampak pada pola pengasuhan anak, di mana pengawasan langsung oleh orang tua menjadi semakin terbatas.

Akibat meningkatnya mobilitas kerja dan tekanan keseimbangan kerja–keluarga, banyak anak menghabiskan waktu lebih lama di institusi pendidikan, layanan penitipan anak, organisasi olahraga, dan kegiatan komunitas. *Australian Institute of Family Studies* (AIFS) mencatat bahwa meningkatnya keterlibatan institusi dalam kehidupan anak menuntut adanya sistem perlindungan anak yang kuat, karena ketergantungan yang lebih besar pada pihak ketiga meningkatkan potensi risiko apabila mekanisme pengawasan tidak memadai (AIFS, 2020). Oleh karena itu, perubahan struktur keluarga dan pola pengasuhan menjadi salah satu

konteks sosial penting dalam meningkatnya urgensi kebijakan perlindungan anak di Australia.

b. Keragaman Budaya dan Tantangan Perlindungan Anak

Australia merupakan masyarakat multikultural dengan proporsi penduduk migran yang tinggi serta keberadaan komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander sebagai bagian integral negara. Berdasarkan data ABS, lebih dari 30% penduduk Australia lahir di luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar Australia (ABS, 2021). Keragaman ini membawa tantangan dalam perlindungan anak karena norma pengasuhan, pemahaman tentang kekerasan seksual, dan sikap terhadap pelaporan kasus berbeda antar budaya.

Laporan *Australian Child Maltreatment Study* (ACMS) menunjukkan bahwa anak-anak dari komunitas Aboriginal and Torres Strait Islander mengalami tingkat kekerasan dan pelecehan yang lebih tinggi dibandingkan populasi non-Indigenous, yang berkaitan dengan faktor marginalisasi historis, kemiskinan struktural, dan keterbatasan akses layanan (ACMS, 2023). Selain itu, *Royal Commission* menyoroti bahwa komunitas migran sering menghadapi hambatan bahasa, ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah, serta stigma sosial yang kuat, sehingga kasus pelecehan seksual anak cenderung tidak dilaporkan (Royal Commission, 2017). Kondisi ini menjadi dasar bagi Australia untuk memasukkan pendekatan sensitif budaya (*culturally safe approach*) dalam strategi nasionalnya.

c. Meningkatnya Kesadaran Publik dan Tekanan Media

Ekspos besar-besaran kasus pelecehan seksual anak melalui media Australia sejak awal 2010-an menciptakan tekanan publik yang signifikan

terhadap pemerintah. Investigasi jurnalisme dan laporan media nasional mengungkap pola sistematis penutupan kasus oleh berbagai institusi besar, termasuk lembaga keagamaan, sekolah, dan organisasi olahraga. Tekanan publik ini menjadi salah satu faktor utama dibentuknya *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse* pada tahun 2013.

Laporan akhir *Royal Commission* menyimpulkan bahwa kegagalan institusional dalam melaporkan dan menangani kasus telah berlangsung selama puluhan tahun dan berdampak serius terhadap keselamatan anak (Royal Commission, 2017). Proses publikasi kesaksian penyintas melalui media dan sidang terbuka mengubah persepsi masyarakat secara luas, dari melihat pelecehan seksual sebagai masalah privat menjadi persoalan sosial dan sistemik. Perubahan persepsi inilah yang memperkuat legitimasi intervensi negara melalui kebijakan nasional jangka panjang.

d. Peran Penyintas dan Transformasi Sosial

Salah satu faktor sosial paling penting dalam lahirnya strategi nasional adalah peran advokasi penyintas kekerasan seksual anak. Selama bertahun-tahun, suara penyintas sering terpinggirkan oleh stigma sosial dan kekuasaan institusional. Namun, melalui *Royal Commission*, lebih dari 8.000 penyintas memberikan kesaksian, baik secara tertulis maupun lisan, yang mengungkap dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap kehidupan mereka (Royal Commission 2017).

Kesaksian publik ini berperan besar dalam mengubah opini masyarakat, meningkatkan empati kolektif, serta menantang budaya diam yang selama ini

melindungi pelaku. Royal Commission menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak harus berpusat pada korban (*victim-centred*) dan berbasis pemahaman trauma (*trauma-informed*). Prinsip-prinsip inilah yang kemudian diadopsi secara eksplisit dalam perumusan *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030*, menjadikan pengalaman penyintas sebagai fondasi transformasi sosial dan kebijakan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, dinamika sosial di Australia juga menunjukkan bahwa perubahan masyarakat modern telah melahirkan bentuk-bentuk risiko baru terhadap keselamatan anak. Salah satu dinamika tersebut adalah urbanisasi dan tingginya mobilitas penduduk. Perpindahan keluarga dari wilayah pedesaan ke kawasan perkotaan, yang umumnya didorong oleh alasan pekerjaan dan pendidikan, sering kali mengakibatkan terputusnya jaringan sosial dan dukungan komunitas yang sebelumnya berperan sebagai mekanisme kontrol sosial informal. Dalam konteks ini, anak-anak menjadi lebih rentan karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa pengawasan sosial yang kuat dari komunitas sekitar.

Di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat anonimitas sosial yang besar, interaksi anak dengan berbagai individu dan institusi baru meningkat, sehingga memperbesar potensi terjadinya situasi berisiko apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai.

Urbanisasi, perubahan norma sosial terkait seksualitas dan relasi kuasa juga mempengaruhi dinamika kekerasan seksual terhadap anak. Selama beberapa dekade, isu pelecehan seksual masih dianggap tabu dalam banyak keluarga dan

komunitas, sehingga korban terutama anak-anak sering kali tidak memiliki ruang aman untuk berbicara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kampanye nasional, edukasi publik, serta keberanian penyintas untuk bersuara telah mulai mengikis budaya diam tersebut.

Paulo Freire (1970) mengemukakan konsep *culture of silence*, yaitu kondisi ketika kelompok rentan tidak memiliki ruang sosial untuk menyuarakan pengalaman penindasan. Dalam konteks pelecehan seksual anak, budaya diam diperkuat oleh stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan akan pengucilan sosial.

Norma sosial yang menyalahkan korban atau menekankan kehormatan keluarga sering kali menyebabkan kasus pelecehan disembunyikan. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan sanksi sosial yang memadai dan berpotensi mengulangi perbuatannya.

Meningkatnya mobilitas global dan arus migrasi internasional turut membentuk tantangan sosial baru dalam perlindungan anak di Australia. Banyak keluarga migran menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan bahasa, ketidakpahaman terhadap sistem hukum Australia, serta rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Kondisi ini menyebabkan sejumlah kasus kekerasan seksual anak tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan secara resmi.

Michel Foucault (1978) menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui relasi sosial dan institusi. Anak berada pada posisi subordinat dalam struktur sosial karena dianggap belum memiliki otoritas atas tubuh dan keputusannya sendiri. Relasi kuasa yang timpang ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh

orang dewasa yang memiliki otoritas sosial, seperti orang tua, guru, tokoh agama, atau pemimpin komunitas. Penyalahgunaan kuasa ini sering kali sulit diungkap karena posisi sosial pelaku yang dihormati dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam konteks masyarakat multikultural tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga layanan yang inklusif, mudah diakses, dan sensitif terhadap perbedaan budaya.

Perkembangan ruang sosial digital juga membentuk risiko yang berbeda dari kekerasan seksual konvensional. Keberadaan komunitas daring, media sosial, dan platform permainan digital memungkinkan pelaku kejahatan seksual untuk beroperasi lintas negara, menyamarkan identitas, dan membangun relasi manipulatif dengan anak tanpa kontak fisik langsung.

United Nations Children's Fund (UNICEF) dan *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* menyebutkan bahwa media online mempermudah perdagangan dan eksploitasi seksual anak, Platform digital sering gagal memberikan perlindungan memadai. Eksploitasi seksual anak secara online merupakan bentuk baru kekerasan sosial yang difasilitasi teknologi.

2.1.2 Konteks Ekonomi

Secara ekonomi, krisis biaya hidup pada tahun 2021-2024 meningkatkan stres dalam rumah tangga, yang secara empiris berkorelasi dengan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, ketergantungan ekonomi korban atau keluarga terhadap pelaku seringkali menjadi penghambat utama dalam pelaporan kasus (*under-reporting*).

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah Australia tidak hanya berurusan dengan aspek hukum, tetapi juga harus menyediakan jaring pengaman ekonomi (*economic safety nets*) bagi korban agar mereka memiliki kemandirian finansial untuk keluar dari lingkungan yang abusif."

a. Ketimpangan Sosial Ekonomi sebagai Faktor Risiko

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu faktor struktural yang meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual anak. Data dari *Australian Institute of Health and Welfare* (AIHW) menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga berpendapatan rendah, rumah tangga dengan pengangguran, atau wilayah terpencil memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual (AIHW, 2022). Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan mental, serta dukungan sosial memperburuk kondisi ini.

Di wilayah regional dan wilayah terpencil Australia, ketersediaan layanan perlindungan anak dan tenaga profesional sering kali lebih terbatas dibandingkan wilayah metropolitan. Ketimpangan ini menyebabkan kasus kekerasan seksual anak tidak tertangani secara optimal atau terlambat terdeteksi. Selain itu, tekanan ekonomi dalam keluarga juga dapat melemahkan kapasitas pengawasan orang tua dan meningkatkan ketergantungan anak pada institusi atau individu lain. Oleh karena itu, strategi nasional secara eksplisit memasukkan upaya pemerataan akses layanan, penguatan kapasitas daerah terpencil, serta dukungan tambahan bagi komunitas yang secara sosial dan ekonomi rentan.

b. Ketersediaan Sumber Daya bagi Lembaga Publik dan Swasta

Pembentukan strategi nasional juga tidak terlepas dari kapasitas ekonomi dan fiskal Australia untuk mendanai kebijakan perlindungan anak dalam jangka panjang. Pemerintah federal melalui berbagai departemen termasuk *Department of Social Services* (DSS) dan *National Office for Child Safety* mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tenaga profesional, program edukasi publik, peningkatan standar keamanan institusi, serta penguatan penegakan hukum, khususnya di ranah digital (DSS, 2021).

Selain sektor publik, Australia juga melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam implementasi strategi, termasuk melalui kewajiban *child safe standards* bagi lembaga pendidikan, olahraga, dan layanan sosial. Ketersediaan sumber daya ini memungkinkan strategi nasional tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam program yang operasional dan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor ekonomi berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Australia.

c. Dampak Ekonomi Digital terhadap Kejahatan Seksual Anak

Pertumbuhan ekonomi digital di Australia menciptakan tantangan baru dalam konteks pelecehan seksual anak. Laporan *Australian Federal Police* (AFP) dan *eSafety Commissioner* menunjukkan peningkatan signifikan kejahatan seksual anak berbasis daring, termasuk produksi dan distribusi *child sexual abuse material* (CSAM). Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial, tetapi juga

membentuk ekonomi ilegal global yang bernilai miliaran dolar (AFP, 2021; eSafety Commissioner, 2022).

Keberadaan pasar gelap CSAM menuntut investasi besar dalam teknologi pendeteksian, pengawasan digital, serta kerja sama internasional. Pemerintah Australia memandang kejahatan seksual digital sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ekonomi digital yang sah. Oleh karena itu, strategi nasional memasukkan penguatan *cyber task-force*, pengembangan teknologi pemindaian gambar ilegal, serta kolaborasi lintas negara sebagai bagian integral dari respons ekonomi dan keamanan.

d. Investasi pada Sumber Daya Manusia dan Layanan Dukungan

Stabilitas ekonomi Australia memungkinkan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia yang berperan langsung dalam perlindungan anak. Pemerintah berinvestasi dalam pelatihan psikolog anak, pekerja sosial, tenaga pendidik, aparat penegak hukum, serta penyidik kejahatan siber. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas tenaga profesional sangat menentukan keberhasilan pencegahan, deteksi dini, dan pemulihan korban pelecehan seksual anak, data menunjukkan pula bahwa orang yang mengalami pelecehan pada masa kecil cenderung lebih tergantung pada dukungan pendapatan pemerintah yang mengindikasikan adanya kerentanan ekonomi (AIHW, 2022).

Selain itu, investasi dalam layanan dukungan korban seperti konseling jangka panjang, layanan *trauma-informed*, dan bantuan hukum dipandang sebagai bagian dari pembangunan modal manusia. Pendekatan ini menempatkan perlindungan anak bukan semata sebagai biaya sosial, tetapi sebagai investasi

ekonomi yang berkontribusi pada produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi nasional menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia dan layanan dukungan merupakan fondasi utama keberhasilan kebijakan perlindungan anak di Australia.

BAB 3

ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGANAN PELECEHAN

SEKSUAL PADA ANAK DALAM

AUSTRALIA NATIONAL STRATEGY TO PREVENT AND RESPOND

TO CHILD SEXUAL ABUSE

Bab ini menganalisis implementasi kebijakan penanganan (*response*) terhadap child sexual abuse di Australia pada periode 2021–2024, yaitu fase awal pelaksanaan *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030*. Fokus analisis ditempatkan pada aspek “penanganan” karena strategi nasional ini tidak hanya mendorong pencegahan, tetapi juga menekankan penguatan kapasitas negara untuk merespons kasus secara cepat, terkoordinasi, serta berorientasi pada pemulihan korban/penyintas. Dalam proposal penelitian, strategi nasional dipahami sebagai kebijakan jangka panjang yang menempatkan isu pelecehan seksual anak sebagai tanggung jawab bersama lintas sektor (sosial, ekonomi, digital, dan komunitas), serta menekankan lima fokus utama, termasuk dukungan menyeluruh bagi penyintas berbasis trauma-informed dan penguatan data serta riset (*Child Protection Australia 2017-18*, n.d.)

Untuk menganalisis proses tersebut, bab ini menggunakan kerangka The Policy Process Implementation dari Thomas B. Smith (1973). Smith memandang implementasi kebijakan sebagai interaksi dinamis antara (1) kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), (2) organisasi pelaksana (*implementing organization*), (3) kelompok sasaran (*target group*), dan (4) faktor lingkungan (*environmental factors*). Pendekatan

ini relevan untuk kasus Australia karena penanganan *child sexual abuse* berlangsung dalam tata kelola federal, melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian/teritori, sekaligus memerlukan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah (lembaga pendamping, penyedia layanan, serta sektor digital).

Secara operasional, “penanganan” dalam bab ini dipahami sebagai rangkaian tindakan setelah risiko atau dugaan kasus muncul, mencakup: (1) mekanisme pelaporan dan identifikasi korban; (2) respons perlindungan anak (*safeguarding*) dan tindakan segera untuk mengurangi risiko; (3) akses layanan dukungan dan pemulihan berbasis trauma-informed (misalnya konseling, layanan sosial, dan dukungan psikososial); (4) respon penegakan hukum dan proses keadilan; (5) respon pada ranah online (pelaporan, penanganan konten berbahaya, investigasi digital, dan identifikasi korban); serta (6) penguatan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kebijakan.

Batasan penting dalam bab ini adalah periode 2021–2024, yang dalam dokumen pemerintah Australia dijelaskan sebagai rentang dua *action plan* awal *First National Action Plan* dan *First Commonwealth Action Plan*. Kedua rencana tindakan tersebut mulai diimplementasikan setelah strategi diterbitkan pada akhir 2021 dan berjalan hingga sekitar akhir tahun finansial 2024–2025 (*Child Safety, 2021, n.d.*). Dengan demikian, analisis diarahkan untuk membaca capaian awal (*early implementation*) dan kendala dominan yang mempengaruhi efektivitas penanganan, bukan untuk menilai hasil akhir strategi 10 tahun.

3.1 *Idealized Policy* pada Aspek Penanganan (*Response*)

Smith (1973:199) mendefinisikan *idealized policy* sebagai desain, bentuk, tujuan, dan legitimasi dari kebijakan yang dirumuskan untuk menyelesaikan masalah, termasuk di dalamnya kejelasan aturan dan instrumen yang digunakan. Pada dimensi kebijakan yang diidealkan, *National Strategy 2021–2030* dirancang sebagai kerangka nasional pertama yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mencegah sekaligus menangani child sexual abuse dalam semua konteks kehidupan anak, termasuk di dalam keluarga, institusi, komunitas, dan ruang digital (*Child Safety, 2021, n.d.*). Dalam proposal penelitian, strategi ini dipahami sebagai respon atas sejarah panjang kegagalan institusional yang terungkap melalui *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*, serta sebagai upaya membangun sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi.

Dalam tahap 2021–2024, strategi dijalankan melalui dua *action plan* awal: *First National Action Plan* (NAP) dan *First Commonwealth Action Plan* (CAP). Dokumen pemerintah menjelaskan bahwa NAP berisi ukuran (*measures*) yang dikerjakan bersama oleh pemerintah federal, negara bagian, dan teritori; sedangkan CAP memuat langkah yang menjadi prioritas dan tanggung jawab pemerintah federal, termasuk fokus pada isu online dan lintas batas (*Child Safety, 2021, n.d.*). Pembagian ini menunjukkan “desain ideal” yang mengakui kebutuhan koordinasi nasional sekaligus realitas pembagian kewenangan dalam sistem federal.

Jika difokuskan pada penanganan, desain ideal kebijakan dapat dirumuskan menjadi lima sasaran utama yaitu: Pertama, meningkatkan kemudahan akses bantuan dan dukungan bagi korban/penyintas. Dalam dokumen ringkas pemerintah, salah satu

ukuran dalam NAP adalah pembentukan *website* dan *helpline* untuk membantu korban/penyintas mengakses bantuan dan informasi (*Child Safety*, 2021).

Kedua, memperkuat penanganan korban/penyintas melalui layanan yang sensitif terhadap trauma. CAP memuat ukuran seperti perluasan layanan hukum spesialis trauma-informed (*Child Safety*, 2021). Ini penting karena proses hukum dan birokrasi layanan dapat menjadi sumber tekanan tambahan, sehingga kebijakan mengarahkan agar layanan bantuan memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak trauma dan kebutuhan korban/penyintas.

Ketiga, memperkuat respons terhadap *child sexual abuse* di ranah online, termasuk identifikasi korban. *Factsheet* pemerintah menyebutkan *implementasi National Victim Identification Framework* untuk *online child sexual abuse* sebagai salah satu ukuran (*Child Safety*, 2021). Kerangka ini, secara ideal, memperjelas peran dan alur kerja antar lembaga dalam identifikasi korban online, mempercepat koordinasi investigasi, dan meningkatkan peluang perlindungan yang cepat bagi korban.

Keempat, memperkuat respons sistemik terhadap anak dengan *harmful sexual behaviours* (HSB). Dalam NAP, salah satu ukuran adalah pembentukan *National Clinical Reference Group* untuk anak dengan HSB (*Child Safety*, 2021). Desain idealnya adalah memastikan respons tidak berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup intervensi klinis, dukungan keluarga, serta jalur rujukan yang aman dan tepat agar risiko berulang dapat ditekan.

Kelima, memperkuat *evidence base*, monitoring, dan akuntabilitas kebijakan, termasuk untuk area penanganan. Pemerintah menekankan pelaporan tahunan sebagai mekanisme akuntabilitas dan transparansi atas pekerjaan yang dipimpin NOCS

bersama pemerintah negara bagian/teritori (*Child Safety*, 2021). Dalam desain ideal, monitoring ini memungkinkan evaluasi apakah tindakan penanganan benar-benar meningkatkan akses korban/penyintas, memperkuat alur respons institusi, dan memperbaiki koordinasi respons *online*.

Agar desain ideal dapat dianalisis, sasaran-sasaran tersebut diturunkan menjadi indikator implementasi penanganan 2021–2024 sebagai berikut: (a) adanya mekanisme akses nasional (*website/helpline*/titik rujukan) dan tingkat pemanfaatannya; (b) ketersediaan layanan dukungan korban/penyintas yang *trauma-informed*, termasuk dukungan hukum; (c) adanya kerangka dan prosedur nasional untuk identifikasi korban online serta koordinasi investigasi; (d) adanya mekanisme klinis/rujukan nasional untuk HSB; (e) adanya pelaporan kemajuan dan evaluasi yang menunjukkan pembelajaran kebijakan (*feedback*).

Namun, sesuai kerangka Smith, kebijakan ideal juga membawa asumsi. Kebijakan mengasumsikan bahwa organisasi pelaksana mampu berkoordinasi lintas yurisdiksi, bahwa target group (institusi, aparat, platform) dapat menyesuaikan praktik penanganan, dan bahwa faktor lingkungan (kerangka privasi, kapasitas layanan, perubahan teknologi) tidak menghambat. Subbab berikut menguji asumsi tersebut melalui pemetaan organisasi pelaksana.

3.2 Implementing Organization: Pelaksana Penanganan

Smith (1973:200) mendefinisikan organisasi pelaksana sebagai struktur birokrasi, kepemimpinan, dan sumber daya lembaga yang bertanggung jawab mengeksekusi kebijakan publik. Implementasi penanganan *child sexual abuse* di Australia berlangsung dalam tata kelola multilevel. Secara kelembagaan, NOCS

dibentuk sebagai pusat koordinasi nasional untuk mengimplementasikan rekomendasi Royal Commission dan menyusun strategi perlindungan anak jangka panjang (*Child Safety, 2021, n.d.*). Dokumen proposal juga menekankan bahwa NOCS menjalankan konsultasi luas dengan pemangku kepentingan (termasuk penyintas, komunitas Aboriginal dan Torres Strait Islander, kelompok multikultural, penyandang disabilitas, akademisi, serta pemerintah negara bagian/teritori) sebelum peluncuran strategi pada Oktober 2021. Konsultasi ini penting karena meningkatkan legitimasi moral dan sosial dari strategi penanganan.

Pada fase 2021–2024, pembentukan *implementing organization* dapat dipetakan berdasarkan fungsi penanganan sebagai berikut:

1. Fungsi koordinasi kebijakan dan monitoring di level nasional. NOCS berperan mengkoordinasikan implementasi action plan, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan melalui kelompok penasihat (seperti *National Strategy Advisory Group*), serta memimpin pelaporan tahunan dan proses evaluasi (*Child Safety, 2021, n.d.; First Commonwealth Action Plan to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse, 2021-2024, n.d.*). Fungsi koordinasi ini strategis karena implementasi action plan melibatkan banyak aktivitas yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan yurisdiksi.
2. Fungsi respons awal dan perlindungan anak di level negara bagian/teritori, dalam sistem federal, banyak kewenangan child protection berada pada negara bagian/teritori, sehingga respons awal terhadap laporan (asesmen risiko, tindakan perlindungan, rujukan layanan) sering bergantung pada kapasitas lokal. Hal ini juga menjelaskan mengapa strategi nasional menekankan kerja sama lintas

pemerintah: pemerintah federal dapat menyediakan kerangka nasional dan sumber daya tertentu, tetapi penanganan di lapangan tetap perlu dijalankan oleh sistem lokal.

3. Fungsi penegakan hukum dan proses keadilan. *Respons* penegakan hukum melibatkan kepolisian negara bagian dan kepolisian federal untuk kasus lintas batas atau online. CAP menekankan langkah-langkah seperti peningkatan intelijen untuk mengidentifikasi pelaku di perbatasan serta kerja sama internasional, yang menandakan fokus nasional pada dimensi transnasional dan online (*Child Safety*, 2021, n.d.). Di ranah online, koordinasi antara aparat penegak hukum, regulator keselamatan online, dan platform menjadi semakin penting.
4. Fungsi dukungan korban/penyintas berbasis trauma-informed. Penanganan tidak berhenti pada aspek hukum; strategi menempatkan dukungan penyintas sebagai fokus kebijakan yang eksplisit. *Implementing organization* pada fungsi ini meliputi layanan kesehatan mental, layanan sosial, lembaga pendamping, serta layanan hukum spesialis trauma-informed. Tantangan implementasinya adalah memastikan ketersediaan layanan, keberlanjutan dukungan, dan prosedur layanan yang tidak menimbulkan *reviktimisasi*.
5. Fungsi respons institusi yang bekerja dengan anak. Sekolah, organisasi olahraga organisasi keagamaan, dan berbagai institusi anak merupakan titik kritis karena banyak temuan *Royal Commission* menunjukkan lemahnya prosedur respons dan akuntabilitas. Strategi menekankan lingkungan *child safe*, yang dalam konteks penanganan berarti institusi harus memiliki mekanisme menerima laporan/keluhan, melindungi anak, dan melakukan rujukan cepat. CAP, misalnya,

mencantumkan penguatan *child safeguarding* di sektor olahraga sebagai salah satu ukuran (*Child Safety, 2021, n.d.*).

fungsi respon ranah digital. Respons online melibatkan platform, regulator keselamatan online, serta lembaga penegakan hukum yang memiliki kapasitas investigasi digital. *Factsheet* pemerintah menekankan ukuran seperti *National Victim Identification Framework* dan penguatan *intelijen finansial* untuk mengganggu arus dana di balik kejahatan (*Child Safety, 2021, n.d.*). Dengan demikian, arsitektur pelaksana penanganan pada ranah online sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan aktor non negara.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa implementasi penanganan adalah “*network governance*”, bukan kerja satu institusi. Dalam kerangka Smith, keberhasilan implementasi bergantung pada biaya koordinasi (*transaction costs*) seberapa jelas pembagian peran, seberapa kuat jalur rujukan, serta seberapa efektif mekanisme komunikasi lintas yurisdiksi. Di sisi lain, organisasi pelaksana menghadapi hambatan struktural yang juga dicatat dalam proposal, yaitu kompleksitas privasi yang diatur oleh beragam undang-undang federal dan negara bagian yang dapat menciptakan kebingungan dalam praktik. Hambatan ini dapat mempengaruhi pertukaran data dan koordinasi penanganan, terutama pada kasus yang membutuhkan respons cepat dan pertukaran informasi antar lembaga.

3.3 Target Group, Sasaran dan Perubahan Praktik pada Penanganan

Smith (1973:201) mendefinisikan kelompok sasaran sebagai individu atau kelompok yang diarahkan untuk menyesuaikan perilaku, praktik, atau interaksinya terhadap aturan dan kebijakan baru, dalam kerangka Smith, target group adalah pihak

yang diharuskan menyesuaikan pola interaksi baru akibat kebijakan. Pada fokus penanganan, target group bukan hanya korban/penyintas sebagai penerima layanan, tetapi juga institusi, aparat, serta aktor digital yang harus mengubah prosedur respons. Pada periode 2021–2024, kelompok sasaran penanganan dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu :

1. Korban/penyintas dan keluarga.

Mereka merupakan sasaran utama dari kebijakan dukungan *trauma informed* dan peningkatan akses bantuan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan pengalaman akses layanan korban/penyintas mampu menemukan informasi dan dukungan lebih cepat melalui titik akses nasional; memperoleh rujukan yang jelas; dan mendapatkan layanan yang lebih sensitif terhadap trauma, termasuk akses ke bantuan hukum spesialis (*Child Safety, 2021, n.d.; Annual Progress Report 2023-2024: National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2024*)

2. Institusi yang bekerja dengan anak (sekolah, organisasi olahraga, layanan sosial, organisasi komunitas,).

Dalam penanganan, institusi diharapkan mengubah praktik dari respons yang “terpisah dan tidak terkoordinasi” menjadi respons yang memiliki standar operasional prosedur yaitu penerimaan laporan, dokumentasi, perlindungan anak, mekanisme eskalasi, dan rujukan layanan. Kebijakan *childsafes* pada akhirnya menuntut institusi memprioritaskan keselamatan anak di atas perlindungan reputasi organisasi.

3. Aparat penegakan hukum dan aktor sistem keadilan.

Kebijakan menuntut peningkatan respons terhadap kasus, termasuk peningkatan intelijen, kerja sama lintas batas, dan pendekatan victim-centred. Target

group ini juga mencakup petugas yang berinteraksi langsung dengan korban/penyintas, sehingga perlu memahami *trauma-informed practice* agar proses hukum tidak menambah beban psikologis.

4. Anak dengan HSB dan sistem yang menangani mereka.

Kelompok sasaran ini menuntut perubahan praktik penanganan dari yang semata “hukuman” menjadi intervensi yang lebih klinis, terukur, dan terintegrasi. Pembentukan *National Clinical Reference Group* dimaksudkan untuk memperkuat pendekatan nasional dan konsistensi respons (*Child Safety, 2021, n.d.*)

5. Ekosistem digital (platform, regulator, penyedia layanan, serta masyarakat pengguna).

Dalam penanganan, target group mencakup pihak yang harus memperkuat mekanisme pelaporan dan respons terhadap aktivitas berbahaya, mendukung identifikasi korban, dan bekerja sama dengan penegakan hukum. Perubahan praktik yang diharapkan mencakup pemrosesan laporan yang lebih cepat, koordinasi dengan kerangka identifikasi korban, serta kebijakan internal platform yang selaras dengan upaya perlindungan anak.

Tabel 3.1
Kelompok Prioritas Strategi Nasional Australia

No	Priority Grup	Resiko Utama Yang dihadapi	Pendekatan Kebijakan yang diterapkan
1	<i>Victims and survivors of child sexual abuse and their advocates</i>	Trauma Panjang, stigma, hambatan akses keadilan dalam pelayanan	Layanan trauma-informed, dukungan psikososial berkelanjutan, akses bantuan hukum, keterlibatan penyintas dalam perumusan kebijakan

No	Priority Grup	Resiko Utama Yang dihadapi	Pendekatan Kebijakan yang diterapkan
2	<i>Children and young people and their support networks</i>	Kerentanan terhadap eksploitasi, ketidaktahuan tentang hak dan mekanisme pelaporan	Edukasi pencegahan berbasis sekolah, penguatan peran keluarga dan pengasuh, sistem pelaporan ramah anak
3	<i>First Nations peoples</i>	Trauma antar generasi, ketidakpercayaan terhadap institusi, ketimpangan layanan	Pendekatan culturally safe, kepemimpinan komunitas adat, layanan berbasis komunitas dan budaya
4	<i>CALD communities</i>	Hambatan bahasa, norma budaya yang menghambat pelaporan, keterbatasan informasi.	Penyediaan layanan multibahasa, mediator budaya, kampanye edukasi yang sensitif budaya
5	<i>People with disability</i>	Risiko pelecehan lebih tinggi, keterbatasan komunikasi, ketergantungan pada pengasuh	Mekanisme pelaporan inklusif, pelatihan khusus tenaga layanan, perlindungan tambahan di institusi.
6	<i>LGBTQIA+ people</i>	Stigma sosial, diskriminasi, kerentanan ganda terhadap kekerasan	Layanan aman dan non-diskriminatif, pelatihan sensitivitas gender dan seksualitas
7	<i>People living in regional and remote communities</i>	Keterbatasan akses layanan, isolasi geografis, kurangnya tenaga profesional	Telehealth, layanan mobile, penguatan kapasitas lokal dan koordinasi lintas wilayah

Sumber : halaman resmi *National for Child Safety*

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pengelompokan *priority groups* dalam strategi nasional Australia telah selaras dengan prinsip dasar Model Implementasi Thomas B. Smith, khususnya dalam hal pengakuan terhadap heterogenitas target groups. Meski demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan identifikasi kelompok sasaran, tetapi juga oleh kemampuan sistem implementasi untuk mengelola perbedaan kapasitas, respons, dan konteks sosial masing-masing kelompok. Dengan demikian, *priority groups* berperan

bukan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai faktor kunci yang menentukan tercapainya tujuan kebijakan ideal dalam praktik nyata.

3.4 *Environmental Factors*, Kondisi yang Mempengaruhi Penanganan

Smith (1973:202) mendefinisikan faktor lingkungan sebagai kondisi eksternal non-struktural (sosial, ekonomi, politik, hukum, dan teknologi) yang dapat mendukung atau menghambat jalannya implementasi kebijakan. Faktor lingkungan dalam konteks Australia mencakup realitas sistem federal, dinamika hukum privasi, dan ancaman teknologi yang membentuk ekosistem perlindungan anak (Adams & Lee-Jones, 2016).

Faktor lingkungan (*environmental factors*) adalah variabel eksternal yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi. Dalam penanganan *child sexual abuse* 2021–2024, beberapa faktor lingkungan utama adalah berikut.

1. Struktur Federal dan Variasi Kewenangan Antar Yurisdiksi.

Karena banyak kewenangan *child protection* dan layanan sosial berada pada negara bagian/teritori, standar dan kapasitas respons dapat bervariasi. Variasi ini berpotensi menciptakan ketimpangan penanganan, terutama jika korban/keluarga berpindah wilayah atau jika kasus melibatkan institusi lintas yurisdiksi.

2. Kompleksitas Data Privasi dan Pertukaran Data.

Dalam kebijakan Pemerintah Australia, privasi dijelaskan diatur oleh sejumlah undang-undang *Commonwealth* dan negara bagian yang beragam, sehingga menciptakan kompleksitas dan kebingungan dalam implementasi praktis. Pada penanganan, isu privasi berdampak pada pertukaran informasi untuk melindungi anak secara cepat, integrasi data untuk monitoring, dan koordinasi antara layanan kesehatan,

pendidikan, serta penegakan hukum. Ketidakpastian mengenai batasan berbagi data dapat menyebabkan organisasi menunda tindakan karena takut melanggar aturan.

3. Transformasi Digital dan Perubahan Modus Kejahatan.

Perkembangan teknologi memunculkan modus baru, sehingga penanganan membutuhkan kapasitas investigasi digital, mekanisme pelaporan yang efektif, dan kerja sama dengan platform. Dinamika teknologi bergerak cepat, sehingga kebijakan membutuhkan pembelajaran berkelanjutan dan penyesuaian melalui feedback.

4. Ketimpangan Akses Layanan *Trauma-Informed*.

Penanganan membutuhkan layanan dukungan jangka panjang, tetapi ketersediaannya tidak selalu merata, terutama di wilayah rural/remote. Selain itu, keberagaman budaya Australia menuntut layanan yang *culturally safe*, termasuk untuk komunitas Aboriginal dan Torres Strait Islander. Kebutuhan *culturally safe services* dapat mempengaruhi desain program dukungan dan proses rujukan.

5. Budaya Pelaporan dan Tingkat Kepercayaan Pada Institusi.

Sejarah respons institusional yang buruk dapat mempengaruhi keputusan korban/keluarga untuk melapor dan mencari bantuan. Rendahnya pelaporan tidak selalu berarti rendahnya kejadian; bisa juga berarti hambatan sosial. Karena itu, keberhasilan penanganan harus dilihat dari kombinasi indikator (akses layanan, kualitas respons, dan perubahan mekanisme institusi).

Faktor-faktor lingkungan ini membentuk konteks tempat organisasi pelaksana bekerja. Dalam logika Smith, faktor lingkungan dapat memperkuat atau melemahkan implementasi, bahkan ketika desain kebijakan sudah jelas. Subbab berikut mengaitkan

faktor-faktor ini ke dalam dinamika *tensions–transactions–feedback* untuk membaca proses adaptasi kebijakan 2021–2024.

3.5 Dinamika Implementasi: *Tensions–Transactions– Institutions -Feedback*

Kerangka Smith menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan proses linear. Implementasi bergerak melalui ketegangan (*tensions*) yang memunculkan negosiasi/penyesuaian (*transactions*) serta menghasilkan umpan balik (*feedback*) yang mempengaruhi implementasi berikutnya. Dalam penanganan child sexual abuse 2021–2024, dinamika ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Tensions* (Ketegangan)

Pertama, ketegangan *multilevel governance*. Kebijakan nasional menuntut koordinasi, sementara negara bagian/teritori memiliki kewenangan dan sistem berbeda. Ketegangan muncul ketika upaya standarisasi penanganan bertemu praktik lokal yang telah lama berjalan, atau ketika kapasitas layanan tidak setara. Ketegangan ini berpotensi menghasilkan implementasi yang tidak merata antar wilayah.

Kedua, ketegangan antara kebutuhan berbagi informasi dan perlindungan privasi. Penanganan yang cepat membutuhkan pertukaran data antar lembaga, tetapi kerangka privasi yang beragam menciptakan kebingungan dan kehati-hatian yang berlebihan. Organisasi dapat ragu berbagi informasi, sehingga respons perlindungan atau rujukan layanan menjadi lebih lambat.

Ketiga, ketegangan dalam respons online: antara platform, regulator, dan penegakan hukum. Platform memiliki mekanisme penanganan konten sendiri, sementara penegakan hukum membutuhkan proses legal dan bukti. Ketegangan dapat

muncul terkait kecepatan takedown versus kebutuhan menjaga bukti, yurisdiksi lintas negara, dan keterbatasan sumber daya digital forensik.

2. *Transactions* (Negosiasi/penyesuaian)

Ketegangan mendorong *transactions* berupa pembentukan mekanisme koordinasi dan perangkat kebijakan yang lebih operasional. Pembagian implementasi melalui NAP (upaya bersama lintas pemerintah) dan CAP (prioritas federal) merupakan bentuk penyesuaian kelembagaan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan isu nasional seperti online dan lintas batas mendapat perhatian khusus (*Child Safety, 2021, n.d.*).

Transactions juga terlihat dalam pembentukan mekanisme konsultasi dan kelompok penasihat. NOCS membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah melalui *National Strategy Advisory Group* untuk mendukung implementasi action plan (*Child Safety, 2022*). Pada area HSB, pembentukan *National Clinical Reference Group* merupakan transaksi kebijakan yang bertujuan memperkuat respons klinis dan konsistensi nasional (*Child Safety, 2021b*).

Pada aspek dukungan korban/penyintas, transaksi kebijakan tampak dalam rancangan *national point of referral (website/helpline)*. Konsultasi pemerintah menyebutkan bahwa referral point dimaksudkan sebagai titik akses terpusat untuk informasi dan rujukan, bukan penyedia layanan langsung, sehingga dapat menghubungkan korban/penyintas dengan layanan yang relevan di berbagai yurisdiksi (Attorney-General's Department, 2024). Ini adalah penyesuaian yang mengakui fragmentasi sistem layanan dan mencoba menyederhanakan "jalur masuk" (*access pathway*).

3. *Institutions* (Kelembagaan)

Sebagai proses dinamis yang menjadi pintu masuk bagi korban/Penyintas untuk mengakses layanan sekaligus sebagai target grup, *institutions* menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan di level bawah. Jika institusi gagal bertransformasi, kebijakan nasional tidak akan menyentuh korban/penyintas.

4. *Feedback* (Umpan balik)

Umpan balik hadir melalui pelaporan tahunan, evaluasi, dan data kemajuan aktivitas action plan. Pemerintah menekankan akuntabilitas dan transparansi melalui annual reporting yang dipimpin NOCS (*Child Safety, 2021, n.d.*). Laporan tahunan juga menekankan adanya pembaruan kemajuan atas seluruh aktivitas pada dua action plan awal (*Child Safety, 2023*). Dalam desain ideal, feedback menjadi instrumen pembelajaran kebijakan: memperbaiki alokasi sumber daya, menyesuaikan prioritas, dan memperkuat langkah penanganan pada action plan berikutnya.

Dengan demikian, implementasi penanganan periode 2021–2024 dapat dipahami sebagai proses adaptif. Kebijakan tidak semata berhasil atau gagal, tetapi bergerak melalui kompromi, pembaruan perangkat implementasi, dan pembelajaran yang dipengaruhi oleh struktur federal, privasi, serta perubahan digital

3.6 Kendala Utama dan Dampaknya terhadap Penanganan Korban

Berdasarkan pemetaan Smith dan analisis klaster, kendala utama penanganan pada periode 2021–2024 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kompleksitas yurisdiksi dan ketimpangan kapasitas layanan.

Penanganan membutuhkan intervensi cepat dan dukungan jangka panjang. Dalam struktur federal, variasi kapasitas negara bagian teritori dapat menciptakan perbedaan

kualitas penanganan. Dampaknya, korban atau penyintas di wilayah tertentu mungkin mengalami akses layanan yang lebih lambat atau terbatas, dan institusi lokal memiliki kemampuan berbeda dalam merespons laporan. Ketimpangan ini juga berpotensi mengurangi konsistensi standar penanganan yang diharapkan kebijakan nasional.

2. Hambatan pertukaran data antara lembaga yang beragam.

Kebijakan menekankan bahwa privasi diatur oleh beragam undang-undang federal dan negara bagian yang menciptakan kompleksitas dan kebingungan. Pada penanganan, dampaknya langsung koordinasi antar lembaga dapat melambat, rujukan layanan dapat tersendat, dan monitoring kebijakan dapat kurang presisi karena data tidak terintegrasi. Jika organisasi menjadi sangat berhati-hati (*risk-averse*), maka tujuan respons cepat dan konsisten sulit tercapai.

3. Tantangan penanganan online yang cepat berubah.

Kejahatan online menuntut kapasitas teknis tinggi dan kerja sama lintas batas. Keterbatasan sumber daya investigasi digital, ketergantungan pada kerja sama platform, serta masalah yurisdiksi dapat melemahkan efektivitas penanganan. Dampaknya, proses identifikasi korban dan penegakan hukum dapat membutuhkan waktu lama, sementara risiko dapat terus berlangsung.

4. Budaya pelaporan dan tingkat kepercayaan publik.

Sejarah kegagalan institusional dapat menurunkan kepercayaan korban atau keluarga untuk melapor. Dampaknya, sistem penanganan yang bergantung pada laporan formal dapat kehilangan banyak kasus yang tidak masuk ke sistem, sehingga capaian kebijakan mungkin terlihat baik di atas kertas tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tahun 2021–2024 juga menunjukkan indikasi transaksi kebijakan yang penting yaitu pembagian *action plan* (NAP dan CAP) untuk mengelola kewenangan, pembentukan perangkat nasional (titik akses rujukan, kerangka identifikasi korban online, dan kelompok rujukan klinis), serta mekanisme pelaporan tahunan untuk akuntabilitas. Konsultasi pemerintah juga mencatat komitmen pendanaan dan jumlah ukuran/aktivitas dalam action plan, yang mengindikasikan adanya dukungan sumber daya pada fase awal (*Annual Progress Report 2023-2024: National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse* 2024)

Tabel 3.2
Ketepatan Waktu Aplikasi Jangka Panjang yang Tersedia

Skema Tahun	Tahun Anggaran 2020-2021	Tahun Anggaran 2021-2022	Tahun Anggaran 2022-2023	Tahun Anggaran 2020-2024
Permohonan yang diterima	3.749	5.980	10.709	16.324
Permohonan yang ditarik kembali	105	301	494	523
Tersedia di Juni 2024	457	1.905	6.907	15.725
Jumlah Aplikasi yang sedang diproses	837	2.742	9.649	25.376

(*Australian Government, National Office for Child Safety., n.d.*)

Tabel ini menyajikan status semua aplikasi yang diterima di setiap tahun tersebut diatas, per tanggal 30 Juni 2024. Layanan Dukungan Ganti Rugi (*Redress Support Services/RSS*) adalah layanan khusus, berbasis trauma, aman secara budaya, dan berpusat pada penyintas. RSS menyediakan dukungan praktis dan emosional secara

gratis dan rahasia sebelum, selama, dan setelah seseorang mengajukan, atau mempertimbangkan untuk mengajukan, permohonan ke Skema Ganti Rugi Nasional. Banyak layanan melakukan penjangkauan untuk mendukung orang-orang yang berasal dari demografi penyintas untuk mengajukan permohonan (*National Redress Scheme* 2024)

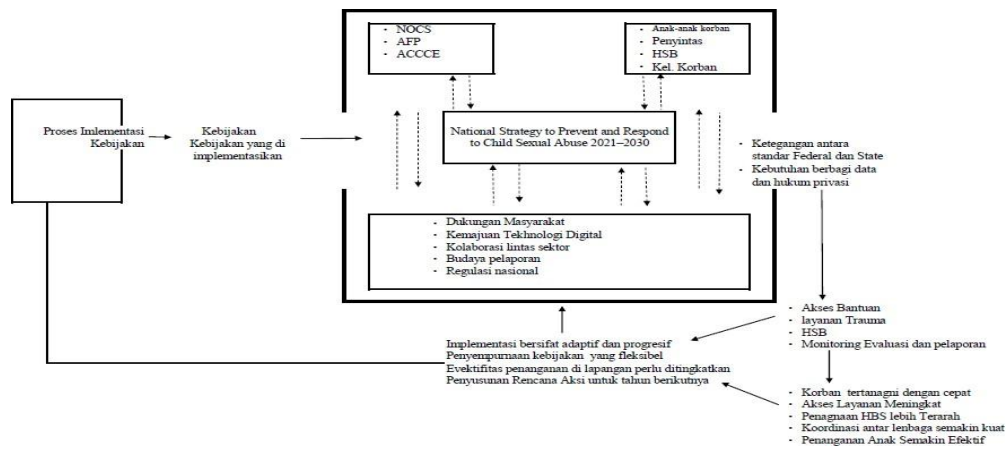
Dalam kerangka Smith, ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa implementasi bergerak menuju koordinasi nasional yang lebih kuat, walau masih menghadapi hambatan struktural. Implementasi penanganan *child sexual abuse* di Australia pada periode 2021–2024 merupakan proses adaptif yang ditandai oleh upaya membangun infrastruktur nasional penanganan (akses korban/penyintas, respons online, dan mekanisme klinis), tetapi implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti variasi yurisdiksi, kompleksitas privasi, serta dinamika digital.

Berdasarkan kerangka Thomas B. Smith, Implementasi kebijakan Australia dalam penanganan pelecehan seksual pada anak di periode 2021-2024, menunjukkan keselarasan yang cukup baik pada dimensi *ideal policy*, akan tetapi pemerintah Australia menghadapi kesenjangan implementatif akibat keterbatasan kapasitas organisasi, yang berdampak pada penurunan kinerja ketepatan waktu dan serta faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dampak kebijakan, Thomas B. Smith, dengan melalui tahapan yaitu *Tensions*, *Transactions*, *Institutions*, dan *Feedback*. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat ketegangan seperti kebijakan ideal dengan antara kebijakan federal dan negara bagian (*stage*). Tetapi, untuk mengatasi hal tersebut organisasi pelaksana

menggunakan pendekatan dengan menghubungkan antara kelompok sasaran, masyarakat, dan pemerintah. Setelah proses implementasi tersebut berjalan dengan baik , maka akan ada *Feedback* menerima dan menolak atau menyempurnakan kebijakan tersebut.

Bagain 3.1

Proses Implementasi Kebijakan Menurut Smith



Sumber : diolah dari Thomas B. Smith 1973

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan penanganan pelecehan seksual terhadap anak di Australia melalui *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030* pada periode 2021–2024, dapat dilihat bahwa tingkat pelecehan seksual pada anak pada periode 2021–2024 terus meningkat hingga saat ini, dalam penelitian ini penulis telah uraikan strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam penanganan pelecehan seksual pada anak, dengan adanya dokumen nasional *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030* menjadi petunjuk dalam diseluruh negara bagian dalam penanganan pelecehan seksual pada anak, Untuk hasil Kesimpulan dalam proses implementasi kebijakan akan dijelaskan pada table di bawah ini

Tabel 4.1
Hasil Analisis Studi Kasus Menggunakan
Strategi Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan	Definisi	Hasil Analisa
<i>idealized policy/</i> kebijakan yang diidealkan	Desain kebijakan penanganan <i>child sexual abuse</i> yang dituangkan dalam <i>National Strategy 2021–2030</i> serta dua <i>action plan</i> awal (NAP dan CAP).	Kebijakan sudah komprehensif dan selaras dengan rekomendasi <i>Royal Commission</i> , namun ambisius sehingga menantang untuk dieksekusi secara merata.
Target Group (Kelompok Sasaran)	Kelompok sasaran yang akan mendapatkan dampak dan manfaat kebijakan.	Anak-anak korban, Kelompok penyintas.HBS, Keluarga Korban
<i>The implementing</i>	Organisasi yang menjembatani kebijakan yang	Terdapat beberapa organisasi pelaksana NOCS,AFP, ACCCE

Implementasi Kebijakan	Definisi	Hasil Analisa
<i>organization</i> organisasi pelaksana	telah dikeluarkan oleh pemerintah.	
<i>Environmental factors</i> /faktor lingkungan	Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan	Dukungan Masyarakat, Adanya kemajuan Teknologi digital, Belum adanya Kolaborasi lintas sektor, kurangnya budaya pelaporan dan Regulasi Nasional
<i>Tensions</i> (Ketegangan)	Benturan kepentingan, nilai, atau kapasitas antar empat faktor utama.	Ketegangan implementasi kebijakan antara negara federal dan state, adanya benturan berbagi data dan hukum privasi
<i>Transactions</i> (Penyesuaian)	Negosiasi, kompromi, atau penyesuaian kelembagaan untuk meredakan ketegangan	Untuk efektifnya kebijakan dijalankan adanya Akses bantuan, layanan trauma, HBS, Monitoting evaluasi dan pelaporan
<i>Institutions</i>	Institusi adalah tatanan, aturan main, atau norma baru yang terbentuk setelah ketegangan (<i>tensions</i>) dan negosiasi (<i>transactions</i>)	<i>Institutions</i> menjadi penentu keberhasilan implementasi di tingkat bawah. Apabila institusi gagal bertransformasi, kebijakan nasional tidak akan menyentuh korban/penyintas.
<i>Feedback</i> (Umpan Balik)	Mekanisme evaluasi dan pembelajaran yang memperbaiki kebijakan berikutnya.	Menjadi Instrumen Pelajaran sehingga implementasi kebijakan bersifat adaptif dan progresif, penyempurnaan kebijakan yang fleksibel, efektifitas penanganan di lapangan perlu ditingkatkan dan penyusunan rencana aksi untuk tahun berikut.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan pemerintah Australia dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak periode 2021–2024, terdapat beberapa

rekomendasi yang penulis diajukan untuk memperkuat implementasi efektivitas kebijakan ke depan.

1. Pemerintah Australia perlu memperkuat koordinasi lintas yurisdiksi antara pemerintah federal dan negara bagian/teritori guna mengurangi ketimpangan kapasitas layanan. Variasi kapasitas antar wilayah yang ditemukan dalam penelitian ini berdampak pada tidak meratanya akses dan kualitas penanganan korban.
2. Reformasi kebijakan privasi dan sistem pertukaran data menjadi hal yang mendesak. Kompleksitas regulasi privasi terbukti menghambat koordinasi antar lembaga serta memperlambat respons terhadap kasus. Pemerintah Australia perlu mengembangkan sistem data terintegrasi serta pedoman yang jelas dalam berbagi informasi guna mendukung respons yang cepat dan tepat;
3. Pemerintah Australia perlu memperkuat respons terhadap kejahatan seksual anak di ranah digital. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut peningkatan kapasitas investigasi digital, kerja sama dengan platform teknologi, serta adaptasi kebijakan yang berkelanjutan ;
4. Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan *Feedback* Implementasi kebijakan yang adaptif membutuhkan sistem evaluasi yang kuat dengan pelaporan tahunan berbasis data dan bukti, mekanisme *feedback* dari penyintas, hal ini penting agar kebijakan tidak stagnan dan terus menyesuaikan dengan situasi atau dinamika di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Age of consent laws in Australia.” 2021. Australian Institute of Family Studies. Age of consent laws in Australia | Australian Institute of Family Studies.
- Adams, Carolyn, and Krista Lee-Jone. 2016. *A Study Into the Legislative - and Related Key Policy and Operational - Frameworks for Sharing Information Relating to Child Sexual Abuse in Institutional Contexts*. N.p.: Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse.
- Ardyta Nabilah, Skiripsi, Pemerintah Australia Dalam Menangani Child Sexual Abuse Pada Institusi Agama Katolik Tahun 2013-2017. Universitas bandar Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Tahun 2019.
- Australian Institute of Health and Welfare. (2025). *Child protection Australia 2023–24*. Retrieved from Child protection Australia 2023–24, About - Australian Institute of Health and Welfare.
- Australian Centre To Counter Child Exploitation: ACCCE. Retrieved June 18, 2025, from ACCCE.
- Attorney-General’s Department (Australia). (2024). Consultation to establish a national point of referral to help victims and survivors of child sexual abuse (NAP Measure 7). Laman konsultasi Attorney-General’s Department.
- Australian Government, National Office for Child Safety. n.d. “Resources to teach body safety.” National Office for Child Safety | National Office for Child Safety. Accessed February 8, 2026. National Office for Child Safety.
- Australian Federal Police. 2021. “AFP Annual Report 2020-21.” 1.7. <https://www.afp.gov.au/sites/default/files/2023-08/AFPAnnualReport2020-2021.pdf>.
- Australian Institute of Family Studies. 2024. *Improving the Safety and Wellbeing of Vulnerable Children: A Consolidation of Systemic Recommendations and Evidence - Research Snapshot*. N.p.: Australian Institute of Family Studies.
- Australia. Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. *Final Report*. Vol. 2. N.p.: Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-_volume_2_nature_and_cause.pdf.
- Australia. Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. *Final Report*. Vol. 1. N.p.: Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_reportvolume_1our_inquiry.pdf.
- “Convention on the Rights of the Child OHCHR.” 1989. ohchr. Convention on the Rights of the Child OHCHR
- Department of the Prime Minister and Cabinet. 2021. *National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse*. N.p.: Australian Government - Department of the Prime Minister & Cabinet. National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021-2030
- Department of the Prime Minister and Cabinet. 2021. *Commonwealth Action Plan: Preventing and Responding to Child Sexual Abuse*. N.p.: Australian

- Government - Department of the Prime Minister & Cabinet.
<https://www.childsafety.gov.au/system/files/2025-04/first-commonwealth-action-plan-to-prevent-and-respond-to-child-sexual-abuse-2021-2024.pdf>.
- eSafety Commissioner. 2025. "Child sexual abuse online." eSafety Commissioner.
<https://www.esafety.gov.au/key-topics/illegal-restricted-content/child-sexual-abuse-online-what-is-online-child-sexual-abuse>.
- Finkelhor, D. (1984). *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*. New York: Free Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Gemma McKibbin, The National Centre for Action Against Child Sexual Abuse, Find an Expert .University of Melbourne.
- National Office for Child Safety. n.d. "National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse: A factsheet for media." Child Safety. National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse: A Factsheet for Media.
- National Office for Child Safety. n.d. "*National Strategy Third Annual Report – 2025*." Australian Government. National Strategy Third Annual Report – 2025.
- National Office for Child Safety. n.d. "*National Strategy Advisory Group*." National Office for Child Safety. Accessed February 8, 2026. National Strategy Advisory Group.
- National Office for Child Safety. 2024. "Monitoring and Evaluation Framework: National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021–2030. Commonwealth of Australia <https://www.childsafety.gov.au/system/files/2025-05/national-strategy-monitoring-and-evaluation-framework.pdf>.
- Queensland Government, *Child Safety Practice Manual* eSafety Commissioner. 2025. "Child sexual abuse online." eSafety Commissioner. Child sexual abuse online | eSafety Commissioner.
- "Recorded Crime - Victims, 2023." 2024. Australian Bureau of Statistics. Recorded Crime - Victims, 2024 Australian Bureau of Statistics
- "Reports of child exploitation to AFP-led ACCCE increase 45% in past financial year." 2024. Australian Centre to Counter Child Exploitation. Reports of child exploitation to AFP-led ACCCE increase 45% in past financial year.
- Richard, Kelly, Kesalahpahaman tentang pelaku kejahatan seksual terhadap anak, https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tahun_2011
- Smith, Thomas B. 1973. "*The Policy Implementation Process*." *Policy Sciences*
- The Commonwealth of Australia. 2023. "Annual Progress Report 2022-23: National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse." <https://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/2023-10/annual-report-2022-23.pdf>.
- UNICEF Australia. n.d. "*The complete United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*." UNICEF Australia. Accessed February 9, 2026. United Nations Convention on the Rights of the Child.
- UNTC. (1989, November 20). UNTC. Retrieved June 18, 2025, from United Nations Convention on the Rights of the Child.
- "What is child abuse and neglect?" 2018. Australian Institute of Family Studies. What is child abuse and neglect? Australian Institute of Family Studies.

“What is child abuse and neglect?” n.d. Australian Institute of Family Studies. Accessed April 12, 2025 What is child abuse and neglect? Australian Institute of Family Studies.

“What is Child Exploitation?” 2024. childfund. What is Child Exploitation? |ChildFund Australia. (n.d.).